

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Pancasila

Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu “panca” yang berarti lima dan “sila” yang berarti dasar atau prinsip. Dengan demikian, Pancasila dapat diartikan sebagai lima dasar atau lima prinsip yang menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara terminologis, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak hanya berperan sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai ideologi bangsa yang memuat nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya, adat istiadat, serta pandangan hidup bangsa Indonesia.

Dalam pandangan Soekarno, Pancasila diposisikan sebagai dasar filosofis sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Atas dasar itu, Pancasila mengemban dua fungsi pokok. Pertama, Pancasila diharapkan menjadi pedoman dan arah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik dalam lingkup keluarga, lingkungan sosial, maupun dalam kehidupan berbangsa, serta dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan negara sehingga seluruh bidang kehidupan kenegaraan, seperti hukum, politik, ekonomi, dan sosial, harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Kedua, Pancasila sebagai perwujudan nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia telah dituangkan secara resmi dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berarti Pancasila memiliki kedudukan sebagai sistem filsafat, yaitu suatu kesatuan nilai yang tersusun secara sistematis dan saling berkaitan antara satu sila dengan sila lainnya.

Setiap sila dalam Pancasila tidak berdiri sendiri, melainkan saling menjiwai dan melengkapi dalam satu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, Pancasila dapat dijadikan sebagai landasan dalam berpikir secara rasional, bersikap secara moral, serta bertindak secara bijaksana dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Kaelan (2016), Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang menjadi sumber nilai bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi landasan dalam membentuk sikap, perilaku, dan karakter masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila memiliki fungsi sebagai pedoman dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya.

Selain itu, menurut Warjiyo, (2025) Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa sekaligus dasar negara, menempati posisi tertinggi sebagai sumber dari segala sumber norma atau sumber hukum dasar nasional dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sebagai dasar negara, Pancasila juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk oleh mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta berperan penting dalam pembentukan karakter bangsa.

2. Nilai-Nilai Pancasila

Nilai merupakan sesuatu yang dianggap penting dan dijadikan pedoman dalam menentukan sikap serta perilaku manusia dalam kehidupan sosial. Nilai juga berfungsi sebagai standar dalam menilai suatu tindakan apakah dianggap baik atau buruk oleh masyarakat.

Menurut Koentjaraningrat (2009), nilai merupakan konsep yang hidup dalam pikiran sebagian besar masyarakat mengenai apa yang dianggap baik, benar, dan penting dalam kehidupan. Nilai menjadi pedoman bagi individu dalam menentukan tindakan dan perilaku dalam kehidupan sosial.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terdiri dari lima nilai dasar yang saling berkaitan, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

Menurut Rohman, (2020) Pancasila mengandung nilai-nilai fundamental yang meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan atau demokrasi, serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pengertian nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila adalah:

1. Nilai Ketuhanan

Nilai ketuhanan dalam Pancasila menempatkan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini bersifat inklusif dan terbuka, yang berarti menghormati keberagaman agama yang ada di Indonesia tanpa adanya pemaksaan kehendak terhadap keyakinan orang lain. Selain itu, nilai ketuhanan juga menekankan pentingnya sikap

toleransi antarumat beragama serta menjunjung tinggi kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

2. Nilai Kemanusiaan

Nilai kemanusiaan dalam Pancasila menekankan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab dan bermoral. Setiap manusia harus diperlakukan secara adil dan beradab tanpa membedakan latar belakang apapun. Nilai ini juga menolak segala bentuk penindasan, diskriminasi, dan ketidakadilan, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Nilai Persatuan

Nilai persatuan dalam Pancasila menegaskan pentingnya menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Persatuan Indonesia dibangun atas dasar semangat kebhinnekaan yang tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai ini mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menumbuhkan sikap nasionalisme yang inklusif, yaitu nasionalisme yang menghargai perbedaan dan tidak bersifat sempit.

4. Nilai Kerakyatan (Demokrasi)

Nilai kerakyatan dalam Pancasila mencerminkan prinsip demokrasi yang berlandaskan musyawarah dan hikmat kebijaksanaan.

Menurut Latif, (2011) kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, namun pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme perwakilan dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Demokrasi Pancasila tidak bersifat liberal yang menekankan kebebasan tanpa batas, dan juga tidak bersifat otoriter, melainkan

mengutamakan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab demi kepentingan bersama.

5. Nilai Keadilan Sosial

Nilai keadilan sosial dalam Pancasila bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan ekonomi dan sosial serta mengurangi kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Nilai ini mengarahkan kehidupan berbangsa pada terciptanya kesejahteraan bersama (*common good*) sehingga seluruh rakyat dapat merasakan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan.

Kelima nilai tersebut mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Kaelan (2016), nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai dasar yang menjadi pedoman dalam pembentukan karakter bangsa serta dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nilai-nilai tersebut tidak hanya bersifat teoritis, tetapi harus diimplementasikan dalam kehidupan nyata oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Penanaman nilai-nilai Pancasila sangat penting terutama bagi generasi muda. Melalui proses pendidikan, nilai-nilai tersebut dapat ditanamkan kepada peserta didik sehingga mereka mampu memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Jadi Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai dasar yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia dan berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, nilai-nilai tersebut perlu ditanamkan kepada generasi muda melalui proses pendidikan.

3. Nilai Pancasila Sila Keempat

a. Pengertian sila Keempat

Sila keempat Pancasila berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Sila ini mengandung nilai demokrasi yang menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan bersama.

Menurut Kaelan (2016) sila keempat Pancasila mencerminkan prinsip demokrasi yang berlandaskan kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya diwujudkan melalui sistem permusyawaratan/perwakilan dalam pengambilan keputusan. Demokrasi Pancasila harus dijalankan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat. Nilai kerakyatan dalam sila keempat dilandasi oleh nilai ketuhanan sebagai dasar moral, didukung oleh nilai kemanusiaan dan persatuan, serta diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial.

Oleh karena itu, pelaksanaan demokrasi harus mengedepankan musyawarah, kebijaksanaan, dan tanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan. Selain itu, sila keempat juga mengutamakan penggunaan hati nurani dan akal sehat dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga mencerminkan kebijaksanaan dalam kehidupan demokrasi.

Pelaksanaan demokrasi tersebut dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama.

b. Butir-butir sila keempat

Menurut Jurdi, (2019) Butir-butir pancasila berisikan hal hal berikut:

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
6. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.
10. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai kebenaran dan keadilan.

Butir-butir sila keempat Pancasila menegaskan bahwa demokrasi Indonesia berlandaskan kedaulatan rakyat yang menjunjung persamaan hak dan kewajiban, serta dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat tanpa pemaksaan kehendak. Setiap keputusan diambil dengan mengutamakan kepentingan bersama, dilandasi

akal sehat dan hati nurani, serta dilaksanakan dengan tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.

c. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat

Secara umum, sila keempat mengandung nilai kerakyatan (demokrasi) yang diwujudkan melalui musyawarah dan hikmat kebijaksanaan. Menurut Kaelan (2016), sila keempat mengandung nilai kerakyatan yang menekankan:

1. Kedaulatan rakyat
2. musyawarah mufakat
3. hikmat kebijaksanaan
4. sistem perwakilan

Berdasarkan konsep kerakyatan yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, dapat diidentifikasi beberapa nilai yang menjadi indikator dalam penelitian ini, yaitu nilai demokrasi, musyawarah, kebijaksanaan, tanggung jawab, menghargai pendapat orang lain, dan mengutamakan kepentingan bersama. Nilai Demokrasi

Nilai demokrasi menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

a. Nilai Musyawarah

Nilai musyawarah menekankan bahwa setiap masalah harus diselesaikan melalui diskusi bersama untuk mencapai mufakat.

b. Nilai Kebijaksanaan

Nilai kebijaksanaan mengajarkan bahwa keputusan harus diambil dengan pertimbangan rasional serta mengutamakan kepentingan bersama.

c. Nilai Tanggung Jawab

Nilai ini menekankan bahwa setiap keputusan yang telah disepakati harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

d. Nilai Menghargai Pendapat Orang Lain

Dalam musyawarah, setiap individu harus menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendaknya.

e. Nilai Kepentingan Bersama

Kepentingan bersama harus diutamakan dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompok.

Menurut Haifarashin dan Dewi, (2022) Demokrasi Pancasila sebagai perwujudan sila keempat mengandung nilai musyawarah dalam pengambilan keputusan bersama serta menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, sikap tanggung jawab, dan penghormatan terhadap pendapat orang lain. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam membentuk karakter warga negara yang demokratis dan menjunjung tinggi kepentingan bersama

Nilai-nilai tersebut sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam lingkungan pendidikan. Mahasiswa sebagai generasi muda diharapkan mampu mengamalkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan akademik maupun dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan.

Jadi Sila keempat Pancasila mengandung nilai-nilai yang menekankan pentingnya Demokrasi, musyawarah, kebijaksanaan, dan tanggung jawab, menghargai pendapat orang lain dalam pengambilan keputusan bersama. Nilai-nilai tersebut sangat penting untuk membentuk karakter demokratis pada mahasiswa.

4. Internalisasi Nilai

Internalisasi nilai merupakan proses penanaman nilai, norma, atau prinsip-prinsip tertentu kepada individu sehingga nilai tersebut menjadi bagian dari kepribadiannya dan tercermin dalam perilaku sehari-hari. Proses internalisasi nilai sangat penting dalam dunia pendidikan karena melalui proses tersebut peserta didik dapat memahami serta mengamalkan nilai-nilai yang diajarkan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Internalisasi didefinisikan sebagai "pengayatan, pendalaman, penguasaan mendalam terhadap suatu ajaran, nilai atau norma, yang berlangsung melalui pembinaan dan bimbingan. Dengan demikian internalisasi adalah suatu proses menjadikan nilai sebagai bagian dari diri seseorang.

Menurut Zubaedi (2011), internalisasi nilai merupakan proses penanaman nilai yang dilakukan secara terus menerus sehingga nilai tersebut dapat dihayati dan diamalkan oleh individu dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Mulyana (2004), Internalisasi nilai adalah proses panjang melalui pembelajaran dan pembiasaan sehingga nilai-nilai yang semula berada di luar diri peserta didik secara bertahap menjadi bagian dari dirinya. Proses internalisasi mencakup transformasi nilai, transaksi nilai, dan transinternalisasi."

Di perkuat dengan teori Muhaimin (2012), internalisasi nilai merupakan proses penanaman nilai ke dalam diri seseorang sehingga nilai tersebut dapat dipahami, dihayati, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui proses internalisasi, nilai yang awalnya berada di luar diri individu akan menjadi bagian dari sikap, perilaku, dan kepribadiannya. Oleh karena itu, internalisasi nilai memiliki peran

penting dalam membentuk karakter seseorang melalui proses pembelajaran dan pembiasaan yang berkelanjutan.

Dalam konteks pendidikan tinggi, internalisasi nilai dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti: Proses pembelajaran di kelas, Diskusi kelompok, Kegiatan organisasi mahasiswa, Serta berbagai aktivitas akademik lainnya.

Melalui proses internalisasi nilai tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami nilai-nilai Pancasila secara teoritis, tetapi juga mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Jadi Internalisasi nilai adalah proses memasukkan, menanamkan, dan membentuk nilai, norma, atau prinsip tertentu ke dalam diri individu (peserta didik) secara bertahap dan berkelanjutan dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari.

5. Tahapan Internalisasi Nilai

Menurut Muhaimin, (2012) internalisasi nilai merupakan proses penanaman nilai ke dalam diri seseorang sehingga nilai tersebut tidak hanya dipahami secara kognitif, tetapi juga dihayati dan diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Proses internalisasi berlangsung melalui tiga tahapan, yaitu transformasi nilai, transaksi nilai, dan transinternalisasi nilai.

Teori tersebut diperkuat oleh Junanto dkk, (2020) yang menjelaskan bahwa internalisasi nilai dilakukan melalui tiga tahapan utama. Tahap transformasi nilai merupakan proses penyampaian nilai kepada peserta didik agar memahami nilai yang diajarkan. Tahap transaksi nilai merupakan proses interaksi dua arah melalui diskusi, pembiasaan, dan pengalaman sosial sehingga individu mulai menghayati nilai tersebut. Adapun tahap transinternalisasi nilai merupakan tahap ketika nilai

telah tertanam secara mendalam dan menjadi bagian dari kepribadian individu yang tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari.

Dalam konteks mahasiswa PPKn di kampus, tahapan internalisasi nilai-nilai Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap Transformasi Nilai, yang berfokus pada ranah kognitif

Merupakan tahap penyampaian nilai oleh pendidik kepada peserta didik melalui proses pembelajaran di mana individu memperoleh informasi dan pemahaman konseptual mengenai setiap sila Pancasila, tujuannya, serta norma-norma turunannya. Dalam konteks mahasiswa PPKn, ini berarti mereka menguasai teori dan mampu menganalisis konsep-konsep seperti Demokrasi Pancasila atau Hak Asasi Manusia.

2. Tahap Transaksi Nilai, yang menggerakkan ranah afektif

Di mana terjadinya tahap interaksi timbal balik antara pendidik dan peserta didik melalui diskusi, refleksi, dan studi kasus, sehingga nilai-nilai tersebut mulai menyentuh kesadaran moral dan emosi mahasiswa, menumbuhkan komitmen untuk menerima dan menghayati nilai tersebut.

Contohnya, mahasiswa menjadi empatik dan berkomitmen untuk menjunjung tinggi toleransi setelah terlibat dalam simulasi penyelesaian konflik keberagaman.

3. Tahap Transinternalisasi Nilai, yang berfokus pada ranah psikomotorik atau perilaku nyata

Di mana nilai yang telah dipahami dan dihayati diwujudkan secara konsisten sebagai karakter dan budaya hidup sehari-hari. Bagi mahasiswa PPKn, ini berarti mereka secara spontan mengamalkan gotong royong di

lingkungan kampus, berani menolak segala bentuk kecurangan, dan menjadi teladan dalam praktik musyawarah yang adil dan bertanggung jawab.

Tahapan tersebut menunjukkan bahwa proses internalisasi nilai memerlukan waktu dan proses yang berkelanjutan agar nilai tersebut benar-benar dapat dihayati oleh individu sehingga nilai tersebut dapat menjadi bagian dari kepribadian seseorang.

6. Jalur-Jalur Internalisasi Nilai Sila Keempat di Perguruan Tinggi

Menurut Zubaedi (2011) dan Tilaar (2009), proses internalisasi nilai di perguruan tinggi salah satu nya program studi PPKn Universitas Muhammadiyah Bengkulu dilaksanakan melalui tiga jalur utama:

1. Jalur Pendidikan dan Penguatan Kurikulum

Dilaksanakan melalui penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah PPKn dan penerapan metode pembelajaran interaktif seperti Case-Based Learning (CBL) dan Project-Based Learning (PBL). Metode ini melatih mahasiswa bermusyawarah dan memecahkan masalah secara kelompok di kelas.

2. Jalur Kegiatan Akademik

Dilaksanakan melalui penyelenggaraan mimbar akademik non-kurikuler seperti seminar kebangsaan, lokakarya, dan Focus Group Discussion (FGD) yang melatih daya kritis, wawasan demokrasi, dan etika berpendapat.

3. Jalur Pendekatan Kebudayaan dan Budaya Kampus (Campus Culture)

Dilaksanakan melalui pembiasaan (habituation) nilai-nilai musyawarah mufakat dalam tata kelola organisasi kemahasiswaan (HIMA PPKn, BEM, IMM) serta penciptaan iklim komunikasi yang inklusif di lingkungan kampus.

7. Pengertian Karakter

Karakter merupakan sifat ,moral,kepribadian seseorang yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Karakter seseorang terbentuk melalui proses pendidikan, pengalaman hidup, serta lingkungan sosial. Dalam konteks mahasiswa, karakter demokratis tercermin dalam kemampuan menyampaikan pendapat secara santun, menghargai perbedaan pandangan, berpartisipasi aktif dalam musyawarah, menerima keputusan bersama, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Karakter demokratis sangat penting dimiliki mahasiswa karena mereka merupakan agen perubahan yang diharapkan mampu mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan akademik maupun kehidupan bermasyarakat.

Menurut Syarif (2021), karakter tidak hanya berkaitan dengan perilaku yang tampak, tetapi juga mencakup nilai-nilai yang tertanam dalam diri individu yang memengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, seseorang yang berkarakter adalah individu yang memiliki kepribadian yang konsisten, yang tercermin dalam sikap, tindakan, serta kebiasaan hidupnya.

Menurut Lickona (2013), karakter merupakan kualitas moral yang tercermin dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak seseorang. Karakter yang baik terdiri atas tiga komponen utama, yaitu moral knowing (pengetahuan moral), moral feeling

(perasaan moral), dan moral action (tindakan moral). Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dalam membentuk perilaku individu yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan kehidupan bermasyarakat.

Karakter juga berkaitan erat dengan aspek moral dan etika, karena mencerminkan bagaimana seseorang menilai baik dan buruk, serta bagaimana nilai tersebut diwujudkan dalam perilaku nyata. Oleh karena itu, karakter menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia, khususnya dalam dunia pendidikan, karena melalui pendidikan karakter diharapkan individu dapat berkembang menjadi pribadi yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan mampu hidup bermasyarakat dengan baik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa karakter adalah keseluruhan sifat, watak, dan nilai moral dalam diri seseorang yang menjadi ciri khas serta tercermin dalam perilaku sehari-hari.

8. Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter merupakan proses pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai moral kepada peserta didik agar mereka memiliki sikap dan perilaku yang baik.

Lickona (2013) menjelaskan bahwa pendidikan karakter bertujuan membentuk individu yang tidak hanya memahami nilai-nilai kebaikan, tetapi juga memiliki kemauan dan kebiasaan untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan karakter tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku peserta didik.

Pendidikan karakter pada dasarnya merupakan bagian dari proses pendidikan yang bertujuan untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia. Hal ini sejalan

dengan pendapat (Hidayatullah, 2010) yang menyatakan bahwa pendidikan adalah upaya sadar dan terencana dalam membimbing individu agar berkembang menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berakhlak (berkarakter) mulia.

Dengan demikian, pendidikan karakter dapat dipahami sebagai proses pembinaan yang dilakukan secara sengaja dan berkelanjutan untuk membentuk kepribadian individu agar memiliki nilai-nilai moral yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, menurut Heri (2014), karakter merupakan kumpulan tata nilai yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku seseorang.

Berdasarkan pendapat tersebut, pendidikan karakter tidak hanya berfokus pada perilaku yang tampak, tetapi juga mencakup penanaman nilai-nilai dalam diri individu yang menjadi dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Oleh karena itu, pendidikan karakter memiliki peran penting dalam membentuk individu agar memiliki konsistensi antara nilai, sikap, dan perilaku.

Dari kedua teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan karakter adalah suatu proses pendidikan yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menanamkan serta mengembangkan nilai-nilai moral dalam diri individu, sehingga terbentuk kepribadian yang baik yang tercermin dalam pola pikir, sikap, dan perilaku sehari-hari.

9. Karakter Demokratis Mahasiswa

Karakter demokratis merupakan sikap yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sosial. Karakter ini sangat penting dimiliki oleh mahasiswa sebagai generasi intelektual yang diharapkan mampu berperan aktif dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Zubaedi (2011), karakter demokratis ditunjukkan melalui sikap menghargai pendapat orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, serta bertanggung jawab terhadap keputusan bersama.

Mahasiswa yang memiliki karakter demokratis akan mampu bekerja sama dengan orang lain, menghargai perbedaan pendapat, serta mengutamakan kepentingan bersama dalam kehidupan sosial.

Karakter demokratis merupakan sikap yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi seperti menghargai pendapat orang lain, musyawarah, dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan bersama.

B. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini berangkat dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila keempat yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Nilai yang terkandung dalam sila keempat meliputi nilai demokrasi, musyawarah, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, menghargai pendapat orang lain, serta mengutamakan kepentingan bersama.

Sila keempat Pancasila mengandung prinsip demokrasi yang menekankan pada musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Nilai tersebut menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu ditanamkan kepada setiap warga negara, khususnya generasi muda.

Proses penanaman nilai tersebut dilakukan melalui internalisasi nilai. Menurut Zubaedi (2011), internalisasi nilai merupakan proses penanaman nilai secara terus-menerus sehingga nilai tersebut menjadi bagian dari kepribadian seseorang dan

tercermin dalam sikap serta perilaku sehari-hari. Dalam konteks pendidikan, proses internalisasi nilai dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran, pembiasaan, keteladanan, serta kegiatan sosial di lingkungan pendidikan.

Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam proses internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada mahasiswa. Menurut Kaelan (2016), pendidikan Pancasila di perguruan tinggi bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai moral, etika, serta karakter kebangsaan kepada mahasiswa agar mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

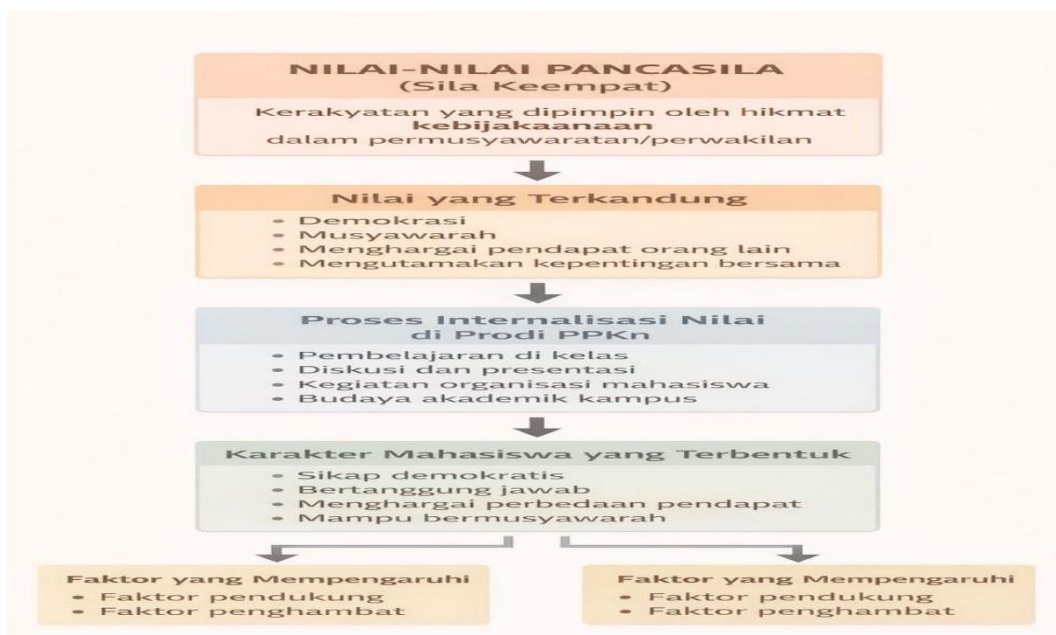
Proses internalisasi nilai sila keempat dalam lingkungan perguruan tinggi dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik, seperti proses pembelajaran di kelas, diskusi dan presentasi, kegiatan organisasi kemahasiswaan, serta budaya akademik yang menumbuhkan sikap demokratis dan musyawarah. Melalui kegiatan tersebut mahasiswa dapat belajar untuk mengemukakan pendapat, menghargai perbedaan pandangan, serta mengambil keputusan secara bersama melalui musyawarah.

Melalui proses internalisasi yang dilakukan secara berkelanjutan, diharapkan nilai-nilai Pancasila khususnya sila keempat dapat tertanam dalam diri mahasiswa dan tercermin dalam perilaku mereka. Hal ini akan membentuk karakter mahasiswa yang demokratis, bertanggung jawab, menghargai perbedaan pendapat, serta mampu menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah.

Namun dalam proses internalisasi nilai tersebut terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilannya, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor pendukung dapat berupa lingkungan kampus yang kondusif, peran dosen dalam memberikan keteladanan, serta kegiatan organisasi mahasiswa

yang aktif. Sedangkan faktor penghambat dapat berupa kurangnya kesadaran mahasiswa, kurangnya partisipasi dalam kegiatan akademik maupun organisasi, serta pengaruh lingkungan sosial.

Bagan Kerangka Berpikir



Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses internalisasi nilai-nilai Pancasila sila keempat dalam membentuk karakter mahasiswa PPKn di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, karakter mahasiswa ppkn serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses tersebut.

C. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan dapat diartikan sebagai penelitian sebelumnya yang dianggap relevan atau memiliki keterkaitan dengan judul dan topik penelitian yang akan dilakukan. Penelitian relevan digunakan untuk menghindari pengulangan penelitian dengan permasalahan yang sama. Dalam penelitian ini, peneliti tertarik membahas, Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membentuk Karakter Mahasiswa PPKn Di Universitas Muhammadiyah Bengkulu(sila keempat) Adapun

jurnal yang berkaitan dengan judul yang akan peneliti bahas adalah sebagai berikut

:

NO	Judul Penelitian	Penulis dan Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila pada Mahasiswa PPKn Universitas PGRI Semarang	Zaki , Bagus, Krisma, Nabaa, Jihan (2024)	Menjelaskan proses internalisasi nilai Pancasila pada mahasiswa PPKn	Kualitatif deskriptif	Internalisasi berjalan melalui budaya akademik, pembiasaan, keteladanan dosen, dan kegiatan organisasi kemahasiswaan
2.	Internalisasi nilai-nilai pancasila dalam membentuk karakter siswa melalui budaya sekolah	Rian Nurizka dan Abdul Rahim (2020)	Menjelaskan proses internalisasi nilai Pancasila dalam membentuk karakter siswa melalui budaya sekolah	Kualitatif Deskriptif	Internalisasi nilai Pancasila dilakukan melalui budaya sekolah yang mencakup lingkungan fisik, sosial, pengelolaan kelas, dan kepemimpinan kepala sekolah dalam membentuk karakter siswa
3	Pembentukan Karakter Mahasiswa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan	Al-Fikri (2022)	Menganalisis peran PKN dalam membentuk karakter mahasiswa	Deskriptif kualitatif	PKN membentuk karakter melalui materi nilai moral & kegiatan pembelajaran
4	Intrnalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam membentuk karakter mahasiswa di Era Digital	Aprianto (2025)	Mendeskripsikan peran budaya kampus dalam menanamkan nilai Pancasila	Kualitatif	Budaya kampus (aturan, kegiatan, pembiasaan, teladan) berperan penting

5	Pengembangan Nilai-Nilai Demokratis Mahasiswa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan	Grissela dkk. (2024)	Menganalisis pengembangan nilai demokratis mahasiswa.	Deskriptif kualitatif.	Pendidikan kewarganegaraan membantu membentuk sikap demokratis, tanggung jawab, partisipasi aktif, dan penghargaan terhadap pendapat orang lain.
6	Internalisasi Nilai-Nilai Nasionalisme dalam Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Junanto, Wahid, dan Wahyu Ningsih (2020)	Menjelaskan proses internalisasi nilai nasionalisme.	Kualitatif deskriptif.	Internalisasi nilai dilakukan melalui tahap transformasi nilai, transaksi nilai, dan transinternalisasi sehingga nilai tertanam dalam perilaku peserta didik.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan penulis memiliki perbedaan pada fokus penelitian yang lebih spesifik yaitu internalisasi nilai Pancasila sila keempat dalam membentuk karakter mahasiswa PPKn di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Selain itu, penelitian ini juga meneliti proses internalisasi, karakter, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pembentukan karakter mahasiswa, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam kajian pendidikan Pancasila.